

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kepercayaan dari masyarakat akan keakuratan dari sebuah laporan merupakan salah satu hal yang menjadikan perlu dilakukan pemeriksaan laporan. Laporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akan suatu peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung. Sama halnya dengan laporan keuangan yang harus dilaporkan harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka harapan dari masyarakat luas akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi tidaklah salah. Dengan melakukan pemeriksaan dapat diketahui pelaksanaan kegiatan telah sesuai atau tidak dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan selanjutnya akan menjamin bahwa tercapainya tujuan kegiatan yang hemat, efisien dan efektif. Sesuai dengan SAP (2005) tujuan dari disusun laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. (Harun 2009 :150)

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sebuah profesi merupakan hal penting bagi suatu organisasi profesi. Merencanakan suatu kegiatan audit merupakan tahapan yang penting dilaksanakan demi memastikan apakah asersi-asersi yang diberikan telah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Perencanaan yang telah dilakukan tim terkadang akan berbeda dengan

yang akan terjadi nantinya dilapangan, perbedaan tersebut dianggap sebagai salah satu resiko tim dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Auditor BPKP pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga keberadaannya dengan mengawasi keuangan negara. Seperti yang terdapat pada Pasal 59 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 menyebutkan bahwa BPKP adalah instansi pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jabatan fungsional auditor yang dimiliki meliputi : penyusunan pedoman teknis, sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kemampuan auditor.

Selain itu sesuai dengan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) .BPKP memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan. (Sukriah dkk, 2009 dalam Aziazah ,2015)

Kinerja auditor merupakan hasil karya yang dicapai oleh seseorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara kualitas dan kuantitas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, ketepatan waktu sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Dalam berita yang dimuat dalam media surat kabar (Kompas ,12 Juli 2013) terjadi kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas yang dilakukan audit bersama

di Inspektorat Jendral Kementrian Pendidikan Nasional yang melibatkan 10 auditor BPKP dan mantan Irjen yang menjadi terdakwa. Beberapa auditor tersebut menerima komisi dalam penyusunan SOP kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana bersama Itjen Kemendiknas. Pelaksanaan penyusunan SOP seharusnya dilakukan ditempat yang telah disepakati namun pada kenyataannya dilakukan dikantor *auditee*, sehingga anggaran yang seharusnya digunakan untuk menyewa tempat penyusunan SOP menjadi tidak digunakan.

Kasus lain yang terjadi yaitu kasus korupsi di Pelindo II yang mana menuntut kerjasama antara BPK dan BPKP serta Polri untuk mengusut kasus tersebut, hasil audit yang dilakukan BPK tidak kunjung disampaikan kepada Polri sehingga penanganan kasus ini menjadi lamban ([beritajateng.net](http://beritajateng.net)). Kasus lain terjadi pula di Sumatra Selatan yang dimana masyarakat mempertanyakan kinerja auditor yang bekerja di BPK dan BPKP Provinsi dalam mengusut kasus korupsi yang telah satu tahun berhenti dalam proses pemeriksaan, karena hasil audit yang tidak kunjung dipublikasikan ,selain itu tidak terbukanya BPK dan BPKP dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada masyarakat menjadikan masyarakat mempertanyakan bagaimana kinerja auditor pemerintah yang dimana mereka telah dibiayai oleh negara untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya yaitu dengan mengusut kasus korupsi.

Sikap seorang atasan atau pimpinan menjadi panutan bagi anak buahnya, selain itu perilaku saat memimpin tim atau kelompok juga diperhatikan. Pemimpin yang mengutamakan hubungan maka akan menjalin pola

kepemimpinan dengan mengutamakan hubungan kedekatan pemimpin dengan anggota tim-nya. Namun, jika mengutamakan tujuan/tugas maka hubungan yang dekat tidak diperhatikan melainkan, mengutamakan cara yang harus digunakan untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan tugas. Seperti halnya kasus audit yang dilakukan di Rumah Sakit Sumber Waras yang dikatakan menyebabkan kerugian Rp. 173 miliar, kasus yang di audit oleh BPK ini dianggap meragukan oleh KPK dikarenakan hasil yang didapatkan berbeda dengan audit yang dilakukan oleh KPK sendiri yaitu, tidak ada temuan terjadi korupsi atau perbuatan melanggar hukum. Karena hal itu BPK harus bertanggungjawab atas temuannya itu, agar kedepannya temuan BPK bisa dipercaya lagi keakuratannya ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)) . Dalam pemberitaan lain ketua BPK menyatakan bahwa kinerja auditor BPK tidak perlu dipertanyakan lagi sebab, setiap tim audit ada supervisi dari internal BPK, baik dari sisi pelaksanaan audit maupun kualitas laporan. Setiap keahlian auditor yang bekerja di BPK telah diakui oleh dunia, dan BPK dipercaya oleh INTOSAI sebagai organisasi utama di seluruh dunia untuk menjadi Ketua dari “*working group*” untuk “*Environmental Auditing*”. Selain itu interaksi dengan lembaga internasional membuat kualitas dan kompetensi auditor BPK semakin berkembang serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan relevan. ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com))

Berdasarkan fenomena yang terjadi, menunjukkan bahwa auditor harus memiliki sikap hati-hati dan kecermatan dalam menangani sebuah kasus sehingga kasus yang terjadi atas audit RS Sumber Waras tidak meragukan pengguna khususnya KPK dan masyarakat umum. Dilakukan supervisi di tiap tim audit

yang bekerja dilapangan telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku bagi seorang auditor, namun dapat terjadi perbedaan kondisi dengan yang ada di lapangan. Seperti kurangnya pengalaman dan kompetensi orang yang diserahkan tugas sebagai supervisor. Memperhatikan target yang harus dituju sehingga banyak kasus korupsi tidak terungkap dalam jangka waktu yang cukup lama. Kinerja auditor menjadi hal yang akan diragukan masyarakat karena lama jangka waktu dalam menyampaikan hasil pemeriksaan mereka. Hal itu dapat memperlihatkan sikap auditor sebagai SDM bagi pemerintah yang mengabaikan sikap *due professional*. Pimpinan BPK dan BPKP diharapkan dapat mengontrol kinerja anak buahnya, terutama di daerah. Sehingga memiliki visi yang sama antara BPK,BPKP, dan Polri untuk memberantas korupsi. Posisi BPKP sebagai seorang auditor yang berhubungan langsung atas perintah dari Presiden maka tuntutan tanggung jawab untuk mengemban amanah yang telah diberikan Presiden semakin besar pula. Kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya potensi kelemahan ataupun penyimpangan dari bidang keuangan negara merupakan tugas utama BPKP, namun selain itu fungsi *atestasi, assurance, dan consulting* yang berguna dalam upaya perbaikan proses *governance*, manajemen resiko, dan sistem pengendalian yang diharapkan kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor pemerintah berkelas dunia yaitu pada aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk. (Rencana Strategis Sekretariat Utama BPKP 2015-2019)

a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapabilitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai proses *governance* manajemen resiko, dan sistem pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP.

c. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*lverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

Telah disebutkan bahwa SDM BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasannya. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP 2011). Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Salah satu dari unsur-unsur pengendalian mutu adalah dengan adanya supervisi. Sukrisno (2012 :18) mengungkapkan lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan.

Unsur supevisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, *me-review* pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat antar staf audit kantor akuntan. Luasnya ruang lingkup supervisi yang memadai dalam suatu keadaan tergantung atas banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit.(PSA No. 05 SPAP 2011)

IPPF 2013 No. 1200 mengenai Kecakapan dan Kecermatan Profesional menyatakan bahwa penugasan harus dilaksanakan dengan menggunakan keahlian/kecakapan dan kecermatan profesional (*due professional care*). Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya merupakan istilah kolektif dalam menunjukkan keahlian/kecakapan profesional. Oleh karenanya seorang auditor paling tidak memperoleh sertifikasi dan kualifikasi agar dapat membuktikan profesinya tersebut dan dapat dipercaya. Dalam IPPF 2013 pasal 1220 menyatakan jika Auditor Internal harus menggunakan kecermatan dan keahliannya sebagaimana mestinya yaitu dengan menggunakan sikap kehati-hatiannya dan kompetensi, namun disebutkan pula jika sikap cermat secara profesional tersebut bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Luh Ayu Alita Ermayanthi (2016) yaitu meneliti tentang integritas sebagai pemoderasi pengaruh *due professional care* pada kinerja auditor inspektorat yang dimana menyatakan bahwa *due professional care* memiliki kendali dalam pelaksanaan kinerja auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Gianyar, hal ini pun membuktikan kepatuhan auditor Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah terhadap Standar Pengawasan Keuangan Negara 2007 dan Standar Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 mengenai kewajiban menerapkan sikap *due professional care* saat sedang menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Auditor yang berintegritas tinggi (jujur, berani, dan bertanggungjawab) dalam melaksanakan



tugas akan meningkatkan pula sikap *due professional care* terhadap kinerja auditor dalam pemeriksaan audit yang dilakukan.

Peter G. Northouse (2013: 117) mengungkapkan Gaya kepemimpinan dilakukan dalam bentuk motivasi akan adanya tugas atau karena adanya hubungan. Pemimpin dalam bentuk tugas utamanya peduli akan pencapaian tujuan, sedangkan pemimpin yang dikendalikan hubungan lebih mengutamakan hubungan yang terjalin antar pribadi. Namun, tidak sepenuhnya gaya kepemimpinan yang dirasakan oleh auditor akan memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. (Widhi, 2015)

Berdasarkan uraian yang dilakukannya telah dijelaskan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dikarenakan untuk memastikan apakah peran supervisor, sikap *due professional care*, dan gaya kepemimpinan dalam instansi ini telah dijalankan dengan baik sehingga dapat mengurangi terjadinya penurunan kinerja auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil penelitian, dan perbedaan data yang digunakan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Due Professional Care*, Supervisi, dan Gaya Kepemimpinan Pada Kinerja Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh *due professional care* terhadap kinerja auditor ?
2. Adakah pengaruh supervisi terhadap kinerja auditor ?
3. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kinerja auditor
2. Untuk mengetahui pengaruh supervisi terhadap kinerja auditor
3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai suatu sarana untuk mengembangkan dan usaha penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah, dan memberikan sumbangan wawasan yang lebih luas.
2. Bagi auditor pemerintahan, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja auditor kedepanya.

3. Bagi pengguna informasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan atau referensi guna mengembangkan penelitian selanjutnya.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, perlu dibuat sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang berisikan penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

## **BAB V        PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan keterbatasan dan kekurangan yang dijumpai dalam penelitian serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

